

Anggota Polri Hendaknya Memahami Sistem Hukum dengan segala aspek yang menyertainya



SENJATA Polri adalah hukum, karena selalu bersentuhan dengan hak-hak masyarakat, sehingga harus mampu menguasai sistem hukum. Perlu menggali, dan memahami secara baik, untuk itu pendekatan yang dilakukan adalah pembinaan Sumber Daya Manusia Binkum Polri agar lebih memahami sistem hukum dengan segala fenomena yang menyertainya, demikian antara lain pernyataan Kapolri pada acara pembukaan Rakernis Divkum Polri beberapa waktu lalu di Rupattama Mabes Polri Jakarta.

Lebih jauh Kapolri menyatakan profesionalisme tidak terlepas dari landasan filosofi kerja Polri, tuntutan dan kewajiban moral intelektualnya, guna melaksanakan tugas dan perannya sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sejalan dengan pesatnya dinamika masyarakat modern yang ditandai dengan perkembangan hasil-hasil teknologi yang memiliki dampak negatif berupa kejahatan yang semakin terstruktur dari segi metode dan lintas negara. Sehubungan dengan itu, Kapolri men-

jelaskan ada dua elemen dasar sebagai konsep penjabaran yang bersinergi satu sama lain.

Pertama, profesionalisme dari anggota pengemban fungsi Binkum Polri perlu ditingkatkan. Dengan demikian, kajian sudah tentu bersifat strategis yang harus dilakukan kontinyu dan konsisten.

Kedua, tujuan dari profesionalisme Binkum Polri adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri. Maka, eksistensi Divbinkum Polri beserta jajarannya harus secara sungguh-sungguh memberikan kontribusi untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri, baik fungsi operasional dan fungsi pembinaan, seperti diatur dalam UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan kehidupan demokrasi dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kita tahu bahwa, sejak awal reformasi telah didengungkan oleh rakyat mengenai tuntutan dan tegaknya demokrasi, penegakan hukum dan dijunjung tinggi Hak Asasi Manu-

sia, berantas KKN dan melestarikan lingkungan hidup. Dampak dari reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah membawa perkembangan terhadap kehidupan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. *"Kita tahu, sejak awal reformasi telah didengungkan oleh rakyat mengenai tuntutan dan tegaknya demokrasi, penegakan hukum, berantas KKN dan melestarikan lingkungan hidup,"* tandas Kapolri.

Hukum sebagai sarana sosial menurut Kapolri, adalah untuk menggerakkan mesin sosial masyarakat dalam mencapai tujuannya, utamanya dalam menghadapi perubahan dan pergeseran nilai-nilai yang berpengaruh terhadap norma-norma kehidupan masyarakat. Selain itu hukum diharapkan berfungsi sebagai filter untuk mengatasi berbagai benturan nilai dalam masyarakat. *"Jadi, demokrasi bisa terwujud apabila hukumnya bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, diperlukan anggota Polri yang profesional karena Polri sebenarnya sebagai pengejuantahan penegakan hukum di lapangan,"* katanya mengingatkan dihadapan para pejabat utama Mabes Polri, Kalakhar BNN, Kadivbinkum Polri dan seluruh peserta Rakernis

Peran hukum, menurutnya Kapolri sebagai tumpuan dan harapan masyarakat untuk dapat menjamin tegaknya keadilan. Sebagai refleksi dari cerminan adanya hak dan kewajiban yang diakomodir dalam sistem hukum. Konsepsi betapa pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan konsep dasar yang diletakkan para pendiri Bangsa kita sebagai Negara kesatuan yang didasarkan atas hukum.

Berkaitan dengan tugas, fungsi dan peran Polri, Kapolri mengingatkan bahwa kewenangan yang diberikan Negara kepada Polri seperti diatur dalam UU No.2 Tahun 2002, sangat luas. Bila diidentifikasi, tidak kurang dari 43 poin kewenangan yang diberikan

kepada Polri. Artinya, hal-hal yang sangat privasipun dapat disentuh oleh Polri dalam kaitan dengan tugas-tugas Kepolisian, bahkan dari beberapa unsur penegak hukum, Polri yang terdepan bersentuhan dengan HAM jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya.

Mempelajari hukum harus juga mempelajari fungsi tugas dan peran Polri. Karena Polri, kata Sutanto, sebagai subsistem dari sistem hukum itu sendiri. Polri selalu berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bagian dari pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan di bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, luasnya kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada Polri maka akan sangat rawan terhadap terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. *"Sebagian besar kekuasaan yang diberikan Negara pada satu organ, maka semakin banyak pula peluang, terjadi penyelewengan,"* paparnya. Untuk itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum yang tinggi di seluruh jajaran Polri.

Kapolri mengingatkan Kepolisian memiliki doktrin *"melindungi dan melayani"*, yang mengandung makna mencintai kemanusiaan. Dengan kewenangan yang diberikan, maka secara organisatoris Negara telah memberikan kewenangan untuk mengembangkan organisasinya, sesuai dengan tuntutan tugasnya. Untuk itu, Polri hendaknya mampu menguasai sistem hukum dengan segala aspek-aspek yang menyertainya. Karena senjata Polri adalah hukum, sedangkan pistol, borgol dan pentungan adalah alat pendukung kelancaran tugas Polri di lapangan. Polri harus meletakkan senjata hukum dalam pikirannya, khususnya yang selalu bersentuhan dengan hak-hak masyarakat dan pelaksanaannya dirasakan de-

ngan ukuran suara hati yang terdalam sehingga Polri harus dianggap menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Rakernis Divkum Polri dengan tema: *"Meningkatkan Profesionalisme Fungsi Binkum Polri Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum, Pelindung, Pengayom Dan Pelayan Masyarakat"*, dinilai tepat dan tidak terpisahkan dari sistem pembinaan yang terus dilakukan oleh institusi Polri hingga kini. Eksistensi Divisi Binkum Polri dan jajarannya sebagai bagian dari subsistem Polri sangat diperlukan untuk memberikan dukungan-dukungan terhadap tugas, fungsi dan peran Polri yang demikian luas dan rawan terhadap berbagai pelanggaran.

Sehubungan dengan tugas-tugas Binkum Polri yang begitu kompleks dan strategis, maka diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum itu sendiri, dan memiliki sifat-sifat profesionalisme di bidang tugas pembinaan hukum, untuk terus-menerus dikembangkan sesuai dengan tugas pokok Divbinkum Polri, maka:

Pertama, pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menyangkut pengetahuan tentang sumber hukum, keterlibatan dalam proses perumusan suatu peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di kewilayahan, utamanya bila menyangkut eksistensi Polri dalam suatu peraturann perundang-undangan yang akan dibentuk.

Kedua, pemberian nasehat dan bantuan hukum. Hal ini, menyangkut penyelesaian suatu perkara melalui pemberian nasehat dan bantuan hukum baik dalam maupun luar persidangan untuk kepentingan institusi dan anggota yang telah bertugas dengan benar.

Ketiga, pemberian analisis penerapan hukum terhadap kasus-kasus Pidana, Perdata dan kasus anggota Polri, termasuk pemberian pendapat dan saran penyelesaian suatu perkara anggota PNS diling-

kungan Polri.

Keempat, penyuluhan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kepolisian, baik dalam kaitan dengan tugas Polri maupun yang perlu diketahui keluarga Polri, perlu sosialisasi tentang hukum yang ada, terutama penegakan hukum dan sanksi pidananya. Karena banyak anggota di daerah seperti Polres, Polsek belum memahami betul. *"Misalnya masalah peradilan anakpun belum semua anggota kita pahami"*.

Menyinggung kasus Raju yang ada di Sumatera Utara, Kapolri menilai tidak lepas dari keterbatasan kemampuan aparat, dalam pemahaman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini. *"Jangan hanya menguasai KUHP saja, hukum lain juga harus didalami"*, dihimbau Kapolri kepada peserta Rakernis.

Rakernis yang dilaksanakan seyogyanya memfokuskan kegiatan yang bersifat tukar pikiran dan diskusi untuk saling mengisi baik pengetahuan dan pengalaman tiap peserta. Dengan diperkaya masukan dari berbagai pakar dengan materi; bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, bidang legitasi, bidang Tata Usaha Negara (TUN), bidang pengetahuan budaya hukum, Penegakkan Peraturan Disiplin dan Kode Etik serta permasalahan dalam penerapan hukum.

Mengakhiri amanatnya Kapolri berharap, melalui Rakernis ini berbagai hal dapat digali dan didiskusikan sesama peserta, karena tugas yang berkaitan erat dengan Divbinkum Polri dan jajarannya, menjadi refleksi dalam memberikan dukungan terhadap tugas pokok Polri. *"Agar seluruh peserta mendalami, menggali dan mencari solusi untuk berbagai persoalan, baik yang mencakup kepentingan institusi dan kepentingan anggota Polri, PNS serta keluarganya"*. ***

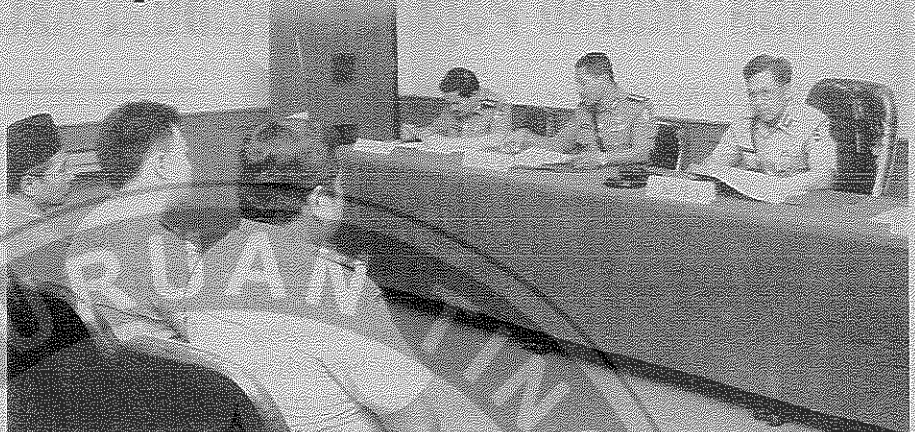
(Disarikan dari Amanat Kapolri pada Pembukaan Rakernis Divkum Polri Tahun 2006)

UNDANG-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa keamanan dalam negeri adalah merupakan tanggung jawab Polri dengan dibantu unsur pengamanan lainnya. Oleh sebab itu Polri diharapkan mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan penegakan hukum, sehingga supremasi hukum berjalan secara baik dan benar. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang Propam adalah antara lain: bahwa sampai saat ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan PNS baik pelanggaran disiplin, tata tertib disiplin maupun pidana, pada tahun 2005 terjadi pelanggaran sebanyak 15.284 kasus dengan perincian: Pelanggaran disiplin = 3.267 kasus, Pelanggaran tata tertib disiplin = 11.245 kasus dan Pelanggaran pidana = 772 kasus. Selain itu pelayanan Polri terhadap masyarakat dirasakan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga tidak henti-hentinya pimpinan selalu mengingatkan agar didalam tugas sehari-hari terus ditanamkan rasa tanggung jawab yang besar dengan tidak melanggar ketentuan yang ada, untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat.

Lebih Jauh Kadiv Propam menyatakan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini situasi telah banyak berubah, terutama sejak dimulainya reformasi yang ditandai dengan perubahan pada tingkat global, regional maupun nasional. Perubahan tersebut menuntut demokratisasi, supermasi hukum dan HAM serta lingkungan hidup yang menuntut Polri untuk melaksanakan tugas lebih profesional serta akuntable dan transparan.

Di daerah-daerah masih banyak pengaduan-pengaduan masyarakat sebagai bentuk komplain terhadap pelayanan masyarakat yang berbentuk kesalahan-kesalahan tugas baik yang disengaja maupun tidak disengaja, hingga masuk dalam kategori melanggar hukum dan HAM. Selain itu pengawasan masyarakat terhadap tugas Polri sangat ketat, sehingga

Sebelum Kita Mampu Merubah Perilaku Masyarakat, Marilah Kita Memperbaiki Perilaku Diri Sendiri



semua komponen masyarakat dapat secara leluasa bisa melakukan koreksi-koreksi terhadap tugas Polri dalam bentuk kritikan/komplain terhadap profesionalisme tugas Polri tanpa mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri. Tugas Propam pada umumnya merupakan tugas penegakan hukum dan disiplin internal anggota Polri dan PNS. Hal tersebut dilandasi dengan beberapa aturan seperti Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Polri serta ketentuan Kode Etik yang telah disepakati bersama.

Untuk itu dihimbau kepada seluruh anggota Polri dan PNS agar selalu berpegang pada aturan main yang telah ada, tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat krusial atau bias.

Sebelum kita mampu merubah perilaku masyarakat, marilah kita memperbaiki perilaku diri sendiri dan menegakkan peraturan yang ada sebagai bentuk perubahan/reformasi dalam tubuh Polri baik yang bersifat structural, instrumental maupun kultural, khususnya perubahan kultur Polri yaitu membentuk Polisi Sipil ini sangat sulit dilaksanakan dan memerlukan waktu yang lama. Namun

semua dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilaksanakan dengan tekad yang kuat dan semangat kebersamaan.

Kadiv Propam Polri menyampaikan penekanan-penekanan sebagai berikut :

1. Tingkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas agar selalu mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Laksanakan tugas dengan didasari rasa ketulusan dan keikhlasan agar mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa serta berguna bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia.
3. Tingkatkan disiplin dari kehidupan sehari-hari sampai kepada tugas kita masing-masing dalam memberikan pengabdian kepada negara Republik Indonesia dan Bangsa.
4. Pegang teguh aturan dan norma yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan lingkungan, serta selalu peka terhadap fenomena sosial yang dapat berkembang menjadi gangguan Kamtibmas dengan selalu memelihara citra Kepolisian yang semakin membaik.
5. Tingkatkan latihan-latihan dalam bentuk simulasi dan drill-drill, agar memiliki kemampuan yang dapat diandalkan sesuai tuntutan dan kemajuan masyarakat.***

Disarikan dari Amanat Kadiv Propam Pada upacara bulanan di Mabes Polri Jakarta

Nota Kesepahaman Antara Polri dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)

KESEPAHAMAN antara Polri dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) bukanlah hal yang pertama kali dilakukan. Secara umum tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dibidang tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kesepahaman kali ini dilakukan berkaitan adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita, yang menyangkut tentang pergeseran fungsi pengawasan Notaris, yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris, telah dirubah dan saat ini oleh Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya oleh Majelis Permusyawaratan Notaris, yang keberadaannya mulai dari tingkat Pusat, kewilayahan dan sampai tingkat Kotamadya dan Kabupaten.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Notaris, PPAT merupakan 2 lembaga yang eksistensinya sebagai Pejabat umum pembuat Akte. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1867 KUHP yang mempunyai arti penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai tanggal, tempat peristiwa dan hubungan hukum yang dikehendaki oleh para pihak sehingga sifatnya merupakan alat bukti yang sempurna, yang terkuat dan terpenuh, dalam suatu perkara perdata di Pengadilan.

Namun dalam hal tertentu jabatan Notaris, PPAT, sangat rentan terhadap berbagai penyalahgunaan jabatan, yang dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pihak-pihak lain, yang memanfaatkan Notaris, PPAT untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui upaya pembenaran atas suatu peristiwa hukum yang tidak pernah ada, dimana tentunya telah masuk dalam lingkup perbuatan pidana.

Oleh karena itu dalam melakukan tindakan hukum, terhadap perkara-perkara pidana, yang melibatkan Notaris, PPAT maka acuan pertama yang betul-betul mendapat perhatian dan pendalaman kita bersama, adalah ketentuan yang terdapat, dalam Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang menentukan, untuk kepentingan proses peradilan Penyidik, Penuntut

Notaris, PPAT merupakan 2 lembaga yang eksistensinya sebagai Pejabat umum pembuat Akte. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1867 KUHP yang mempunyai arti penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai tanggal, tempat peristiwa dan hubungan hukum yang dikehendaki oleh para pihak sehingga sifatnya merupakan alat bukti yang sempurna, yang terkuat dan terpenuh, dalam suatu perkara perdata di Pengadilan.

Umum atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas, daerah berwenang sebagai berikut :

Pertama; Mengambil foto copy minota Akte dan atau surat-surat yang dilakukan pada minota Akte atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Kedua ; Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya, atau Protokol Notaris, yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketiga : Pengambilan foto copy minota Akte, atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuat Berita Acara Penyerahan secara khusus kepada pihak Penyidik Polri, kepada Notaris dan PPAT, perlu pemahaman yang mendalam tentang fungsi dan peranan dari Majelis Pengawas, agar dalam melaksanakan tindakan-tindakan hukum tidak timbul salah faham dilapangan. Perlu segera dilakuka sosialisasi ketentuan-ketentuan tersebut secara bersama-sama oleh pihak Polri, INI dan PPAT agar tujuan utama yang diharapkan dalam Nota Kesepahaman yang baru saja kita tandatangani ini yaitu melaksanakan fungsi tugas dan kewenangan para pihak secara profesional dan saling membantu dibidang upaya penegakan hukum dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.***

*Disarikan dari Amanat Kapolri pada Acara
Penandatanganan Nota Kesepahaman Polri dengan INI serta PPAT
di Rupattama Mabes Polri - Jakarta*

Kamtibmas Tercipta Bilamana Ada Peran Aktif Polri Bersama Masyarakat

TANTANGAN tugas Polri, baik saat ini maupun di masa mendatang tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik yang berskala nasional, regional maupun global. Pengaruh era globalisasi dan informasi, terasa menyentuh di segenap segi kehidupan bangsa, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, keamanan dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan terjadinya gejolak sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Demikian, antara lain paparan Kapolri pada acara pembukaan Seminar tentang Perkembangan Ilmu Kepolisian Dalam Menghadapi Tantangan Tugas Yang Semakin Kompleks, bertempat Kampus PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (31/5).

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Profesor DR. Irjen Pol M Farouk, Kapolri mengingatkan bahwa tantangan tugas Polri, baik saat ini maupun di masa mendatang tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik yang berskala nasional, regional maupun global. diutarakan Kapolri pada acara pembukaan seminar tentang Perkembangan Ilmu Kepolisian Dalam Menghadapi Tantangan Tugas Yang Semakin Kompleks". Kapolri mengingatkan bahwa tantangan tugas Polri, baik saat ini maupun di masa mendatang tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik yang berskala nasional, regional maupun global.

Marak dan makin meluas

Di hadapan staf pengajar Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, mahasiswa PTIK dan peserta seminar lainnya, Sutanto menilai, desakan isu keterbukaan

demokratisasi dan HAM dalam masyarakat semakin marak dan meluas, hingga menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah. Hal itu, lanjut Sutanto, menjadi masalah yang serius bagi pemerintah dan penegak hukum, ketika masyarakat cenderung mengedepankan penyele-



saan yang bersifat konfrontatif daripada melalui saluran hukum yang benar. Seiring dengan pembangunan nasional, menurut Kapolri, telah menjadikan masyarakat memiliki sikap, cara berpikir dan berperilaku lebih modern, lebih kritis, lebih berorientasi pada kepentingan, serta tingkat kepercayaan kepada informasi media massa semakin tinggi. Masyarakat tidak mempan lagi ditakut-takuti oleh kekuasaan dan mitos. Ia menilai, masyarakat lebih rasional, namun mudah dimanfaatkan bagi timbulnya desas-desus dan kerusuhan.

Sosok aparat

Polri, dituntut memiliki kualitas

personel dan organisasi yang tidak semata-mata bertindak berdasarkan undang-undang, tetapi lebih mempertimbangkan kepentingan pengendalian sosial melalui gaya pemolisian yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Kemudian, petugas yang kreatif dalam menentukan pilihan-pilihan, memiliki cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah atau ketegangan sosial yang timbul. "Petugas dituntut mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," tegasnya.

Sosok aparat yang diperlukan, kata Sutanto, penegak hukum yang profesional untuk mewujudkan keamanan dalam negeri pada kehidupan nasional yang demokratis dalam masyarakat madani. Sehingga pembangunan Polri diarahkan menuju Polisi Sipil (*civilian police*). Tugas-tugas profesi menuntut kemampuan dan keahlian khusus dari personel Polri. Seperti pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan secara konseptual dan teorikal untuk menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah sosial dan isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga personel Polri, menurut Kapolri, "harus memiliki sikap, cara berpikir, yang dalam tindakan pemolisiannya dilandasi ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan". Untuk mewujudkan

terpeliharanya keamanan, tegaknya hukum dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kapolri menandakan, personel Polri dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya. Orang yang profesional adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat dan keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi dan pengalaman tugas.

Peranserta masyarakat

Pada bagian lain dari amanatnya, Kapolri menilai akan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya

pembinaan Kamtibmas mendapat perhatian yang saksama, sehingga tumbuh kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam mengelola upaya pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum. "Hal ini sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, serta dibarengi dengan pemahaman dan pengertian atas berbagai kendala keterbatasan yang dihadapi oleh institusi Polisi dalam upaya peningkatan profesionalismenya". Kapolri mengingatkan bahwa pengalaman membuktikan bahwa pengembangan profesi kepolisian tidak hanya dituntut mampu mengambil keputusan secara tepat, tetapi keputusan yang arif. Maka nilai-nilai moral dan etika harus terus dipupuk serta dikembangkan dalam kehidupan setiap anggota kepolisian.

Dalam rangka mencapai profesionalisme kepolisian, menurut Kapolri, selain meningkatkan kualitas ilmu kepolisian perlu didukung oleh perbaikan aspek-aspek lainnya, di antaranya :

1. **Aspek hukum/perundang-undangan.**
 - a. Hukum sudah ada, tetapi masih ada ketidaksesuaian antara UU yang satu dengan UU lainnya. Bahkan ada ketentuan yang statusnya di bawah, bisa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
 - b. Masih banyak UU/hukum positif merupakan produk zaman Belanda yang sudah tidak mampu mengakomodir perkembangan situasi yang ada.
 - c. Belum lengkapnya UU yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang.
 - d. Masih adanya ketentuan perundang-undangan yang pembuatnya berpihak kepada penguasa, sehingga mengakibatkan lemahnya dan adanya keraguan dalam menegakkan aturan tersebut.
2. **Aspek penegak hukum lainnya.**
 - a. Status setiap institusi penegak hukum (Penyidik/Polri, Penuntut Umum/Jaksa, Pengadilan/Hakim) masih sangat bervariasi dan belum menunjukkan kesetaraannya.
 - b. Pembagian tugas dan tanggung jawab hukum, khususnya institusi penyidik masih ada yang dirangkap. Bahkan oleh institusi Penuntut Umum serta institusi di luar CJS.
 - c. Kinerja dan profesionalisme dari setiap institusi penegak hukum

masih dirasakan lemah dan selalu ketinggalan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat/teknologi/informasi.

3. Aspek masyarakat.

- a. Kemajemukan masyarakat baik dari sisi adat/hukum, tingkat pengetahuan dan penguasaan hukum.
- b. Kondisi sosial ekonomi yang masih sangat tajam perbedaannya antara si miskin dan si kaya.
- c. Lemahnya pengendalian/kontrol sosial oleh masyarakat yang selama ini tidak dibangun, namun di era reformasi ini kontrol masyarakat yang tergelar sangat luas, sehingga terkadang tidak terkendali. Dan, apabila tidak segera ditangani dan diakomodasikan secara serius, menurut Kapolri, maka akan sangat berpengaruh terhadap usaha membangun polisi yang profesional

"Kapolri mengingatkan pengalaman membuktikan bahwa pengembangan profesi kepolisian tidak hanya dituntut mampu mengambil keputusan secara tepat, tetapi keputusan yang arif. Maka nilai-nilai moral dan etika harus terus dipupuk serta dikembangkan dalam kehidupan setiap anggota kepolisian."



dan mandiri, sehingga jelas berpengaruh pula terhadap kinerja Polri itu sendiri. Namun, lanjut Sutanto, Polri akan tetap mengoptimalkan kinerjanya dan secara simultan berusaha mendorong, utamanya melibatkan kerja sama dan keterpaduan dengan instansi lainnya.

Tantangan

Terhadap tantangan dihadapi kepolisian, Kapolri menegaskan perlunya penguasaan ilmu kepolisian merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup Polri, karena kompleksitas-kompleksitas masalah Polri dalam melaksanakan pemolisianannya harus dilaksanakan dengan kemampuan dan sikap yang profesional. Namun, profesionalisme Polri dapat terwujud dengan kesiapan dari aparat kepolisian itu sendiri baik

dari SDM Polri, sarana dan prasarana serta anggaran serta didukung aspek lainnya, seperti hukum dan masyarakatnya. "Kesiapan aparat, berarti personel-personel Polri mempunyai kemampuan yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas," ungkapnya.

Sumbangan pemikiran

Ketika menyinggung kualitas Polri, menurut Kapolri, hingga saat ini sudah melaksanakan program pengembangan kemampuan personelnnya. Antara lain: melakukan kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI), program pendidikan S2 dan S3 Kajian Ilmu Kepolisian (KIK). Dengan harapan, bahwa alumni program pendidikan ini dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi kemajuan Polri serta terciptanya profesionalisme dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks pada era globalisasi. Hal lain yang disinggung Sutanto, mengenai perlunya figur kepemimpinan Polri di setiap level, yang memiliki sifat kepemimpinan yang utuh. Yaitu mampu memotivasi dan menggerakkan anggotanya untuk senantiasa hadir dan siap melaksanakan tugasnya. Kapolri mengingatkan, anggota Polri, "dituntut untuk bersih dari KKN, jujur dan adil serta memiliki wawasan yang luas, konsepsional, strategis, serta mampu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan instansi terkait, memiliki ide cemerlang dalam melaksanakan tugasnya serta senantiasa konsisten dalam setiap langkah ucapan dan tindakan".

Solusi dan rekomendasi

Kapolri, kembali menegaskan bahwa profesionalisme Polri berupa kesiapan personel kepolisian dalam hal sikap, cara berpikir, tindakan pemolisian yang dilandasi oleh ilmu kepolisian, didukung oleh aspek-aspek lainnya seperti aspek hukum/perundang-undangan dan aspek masyarakat yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari acara seminar ini, Kapolri berharap dapat menghasilkan solusi dan rekomendasi yang tepat dan aplikatif bagi Polri dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (kamdagri). ***

DENGAN adanya validasi organisasi Polri baik di tingkat Mabes Polri maupun di kesatuan kewilayahan, perlu dilakukan penataan dan pengaturan tentang Badge Pengamanan Objek Khusus (Pam Obsus) Polri. Penataan dan pengaturan tersebut merupakan upaya untuk penertiban penggunaan gampol dan atribut di lingkungan Pam Obsus Polri serta sebagai upaya untuk meningkatkan citra Polisi berseragam dimata masyarakat sekaligus menumbuhkan kebanggaan anggota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kapolri mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol. : SKep/148/III/2005 tentang Ketentuan Bentuk, Ukuran, Warna dan Arti Badge Fungsi Pengamanan Objek Khusus (Pam Obsus) Polri dimana dalam keputusan tersebut dijelaskan tentang :

1. Bentuk, warna dan ukuran Badge fungsi Pam Obsus Polri

- A. Warna : putih, biru muda, kuning, hitam, coklat susu, merah maroon
- B. Ukuran : garis tepi segi 5 : 2 mm
garis tepi tameng:1 mm tali: 1 mm

2. Bentuk, warna dan ukuran tanda satuan organisasi fungsi Pam Obsus Polri

- A. Warna : putih, kuning, hitam, merah maroon
- B. Ukuran : lebar : 16 mm panjang bagian bawah : 65 mm panjang bagian atas : 85 mm

3. Makna Badge satuan organisasi fungsi Pam Obsus Polri

- A. Makna bagian lambang :
 - 1) Persegi lima dengan sisi mendar di bagian atas, dua sisi miring di sebelah kiri dan kanan serta dua sisi miring di bagian bawah membentuk sudut menyerupai ujung tombak berwarna merah maroon.

Ketentuan Badge Fungsi Pengamanan Objek Khusus (PAM OBSUS) Polri Serta Maknanya

- 2) Tiga buah bintang segilima berwarna kuning di atas perisai.
- 3) Perisai tameng berwarna coklat susu.
- 4) Tali berwarna kuning melingkar berpilin di tepi lingkaran globe.
- 5) Lingkaran berwarna biru muda pada sisi bagian dalam tameng, dengan isi :
 - Benteng berwarna coklat susu
 - Gapura di sisi kanan dan kiri benteng berwarna coklat susu
 - Gambar setengah badan tiga orang berpakaian jas berwarna hitam

B. Makna lukisan

- 1) Persegi lima dengan sudut-sudut yang tajam, melambangkan :
 - Setiap tindakan yang dilaksanakan senantiasa berdasarkan atas kewaspadaan, normatif, kecermatan, menjunjung tinggi ham dan profesional.
 - Tindakan tegas dan terukur terhadap setiap pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan dan atau hukum yang berlaku.
 - Warna merah maroon, sebagai latar belakang lambang Pam Obsus Polri dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas setiap insan pam obsus senantiasa dilandasi rasa percaya diri dan berani bertindak berdasar atas hukum yang berlaku.
- 2) Tiga bintang persegi lima berwarna kuning, melambangkan bahwa Pam Obsus Polri dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi dan berpedoman pada Tribrata.
- 3) Perisai/tameng berwarna coklat susu, melambangkan bahwa Pam Obsus adalah bagian dari

organisasi Polri yang pada hakekatnya mempunyai tugas pokok dan kewajiban memberikan perlindungan terhadap objek yang dipertanggungjawabkannya.

- 4) Tali berwarna kuning melingkar berpilin di tepi lingkaran globe melambangkan bahwa Pam Obsus bertugas untuk mengamankan objek-objek yang meliputi : objek vital, objek wisata, diplomat asing dan VIP/VVIP.
- 5) Benteng melambangkan objek-objek vital yang harus diamankan dan dilindungi termasuk segala kelengkapannya.
- 6) Gapura di sisi kanan dan kiri benteng melambangkan sektor pariwisata nasional yang harus diamankan/dilindungi.
- 7) Lingkaran globe, melambangkan ruang lingkup tugas Pam Obsus adalah objek/kegiatan yang berskala nasional, regional dan internasional.
- 8) Warna biru sebagai latar belakang globe melambangkan sasaran tugas Pam Obsus adalah untuk menciptakan rasa aman, damai dan terlindungi.
- 9) Gambar setengah badan tiga orang berpakaian jasa melambangkan VIP/VVIP termasuk diplomat asing yang harus diamankan/dilindungi.

- C. Makna keseluruhan lambang
Anggota Pam Obsus sebagai anggota Polri memiliki sifat ksatria, berani, jujur dan pantang menyerah dalam melaksanakan tugas

mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, profesional dan siap diterjunkan ke segala penjuru serta senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, tribrata dan catur prasetya.

Badge fungsi Pengamanan Objek Khusus (Pam Obsus) Polri dipasang pada lengan baju kanan dan penggunaan Badge Pengamanan Objek Khusus (Pam Obsus) ini berlaku di lingkungan :

1. Tingkat Pusat (Ditpamobsus Babinkam Polri)
2. Tingkat Polda (Ditpamobsus)
3. Tingkat Polwil (Sat Pamobsus)
4. Tingkat Polwiltabes (Sat Pamobsus)
5. Tingkat Poltabes (Sat Pamobsus)
6. Tingkat Polres Metro (Sat Pamobsus)
7. Tingkat Polres/Polresta (Sat Pamobsus)

Sehubungan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKep/148/III/2005 tentang Ketentuan bentuk, ukuran, warna dan arti Badge fungsi Pam Obsus Polri tersebut diatas, kepada Kasatwil/ Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKep/148/III/2005 tentang Ketentuan bentuk, ukuran, warna dan arti Badge fungsi Pengamanan Objek Khusus (Pam Obsus) Polri tersebut di atas.
2. Menginformasikan serta mensosialisasikan Keputusan Kapolri No. Pol. : SKep/148/III/2006 kepada seluruh anggota di wilayah jajarannya.
3. Menanamkan kepada seluruh anggota khususnya yang di tempatkan sebagai personel Pam Obsus bahwa ketentuan bentuk, ukuran, warna dan arti Badge fungsi Pam Obsus Polri tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan citra Polisi berseragam di mata masyarakat sekaligus menumbuhkan kebanggaan sebagai anggota Polri khususnya sebagai anggota Pam Obsus Polri.
4. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan No. Pol. : Kep/148/III/2005 maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.***

Pengamanan dan Pengawasan Terhadap Pemberitaan Kinerja Polri

PEMBERITAAN tentang Polri di media massa baik cetak, elektronik dan visual terhadap kinerja Polri cenderung menyudutkan dan merugikan institusi Polri. Semakin banyaknya program tayangan kriminal di media elektronik seperti Bidik di Metro, TKP di TV7, Sidik Jari di ANTV, Borgol di JTV, Sidik di TPI, Brutal di Lativi, terkesan Polri menjadi komoditi pers.

Dengan ditemukan adanya petugas lapangan yang selalu mengajak wartawan untuk melakukan peliputan di TKP, menginformasikan lebih awal pelaksanaan tugas di lapangan kepada wartawan dan mempublikasikan hasil penyidikan sehingga tugas Polri terkesan komersil dan hanya mencari popularitas.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri No Pol. : STR/129/III/2006 Kapolri melalui Kadiv Propam Polri, bersama ini mengarahkan dan menegaskan kembali kepada kasatwil/ kasatker, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengamanan dan pengawasan setiap giat Polri, terutama penanganan tindak pidana yang diliput oleh wartawan, antara lain :
 - a. Memeriksa kartu identitas kepada setiap wartawan yang meliput kegiatan tugas Polri
 - b. Melarang wartawan memasuki ruang penyidikan dan hanya dikonsentrasikan pada suatu tempat/ruangan tertentu sesuai prosedur yang berlaku
 - c. Tidak mengikutsertakan wartawan bersama petugas ke TKP sehingga terkesan Polri membawa kru media massa.
 - d. Dalam penyampaian informasi diupayakan hal-hal yang positif menyangkut keberhasilan tugas dan bukan hal-hal yang belum dilaksanakan, misalnya taktik dan teknis penyidikan dan harus didampingi fungsi Humas atau Bina Mitra.
2. Melakukan tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas (brutal, sadis, kurang manusiawi, over akting dan arogan serta melanggar ham) sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Memonitor setiap perkembangan pelaksanaan tugas, terutama penanganan kasus-kasus kriminal (tindak pidana) yang sering ditayangkan atau diliput oleh media massa dengan selalu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.***

Cara Bertindak untuk Mengeliminasi Rasa Takut Masyarakat dalam Proses Penyidikan

SALAH satu pilar dalam negara demokrasi adalah supremasi hukum. Posisi hukum menjadi amat penting karena diposisikan sebagai pengatur penyelenggara negara, pemerintah dan sekaligus pengatur perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan hukum tidak selalu berjalan tanpa hambatan karena ketika hukum menukik ke dalam habitatnya, yaitu masyarakat maka akan muncul berbagai hambatan antara lain permasalahan pada pencapaian kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, maka dalam menjalankan hukum selalu mendapat perhatian banyak pihak karena menyangkut perlakuan atas hak-hak individu dan tuntutan kewajibannya yang keduanya terkait dengan kehidupan dalam tataran sosial masyarakat.

Perkembangan penegakan hukum yang dikampanyekan oleh presiden R.I. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai saat ini telah berhasil, tidak hanya seremonial yang lepas dari substansinya, tetapi justru sudah menyentuh hati nurani para penegak hukum sehingga memacu untuk berkompetisi, membuktikan kemampuan dan keseriusannya dalam memberantas korupsi baik dilingkungan sendiri maupun di wilayah yang menjadi wewenang.

Pembentukan KPK, Timastipikor dan pemberdayaan badan peradilan serta pemberdayaan aparat penyidikan dilingkungan Polri memberikan indikasi bahwa aparat hukum telah tersentuh hati

nuraninya untuk membebaskan negara kesatuan R.I. dari penyakit budaya korupsi.

Di lingkungan Kepolisian, gerakan semangat dalam hal penegakan hukum yang bersih dan dipercaya telah dicanangkan sampai ke tingkat Kesatuan Operasional Dasar (KOD) setingkat Polres, hal ini dibuktikan dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2004 dan 2005 sebanyak 522 kasus dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum (P21) sebanyak 235 kasus.

Kinerja Polri di bidang tindak pidana korupsi ternyata mendapat respons yang positif dari masyarakat, hal ini tergambar dari makin meningkatnya jumlah laporan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari warga masyarakat, pengamat politik, LSM yang disampaikan kepada Polri.

Karena gencarnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat, khususnya Polri secara tidak langsung timbul kesan lembaga penegak hukum menjadi

lembaga yang menakutkan, wajah dan sosok Polri menjadi menakutkan padahal pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Polri bertugas antara lain sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa kehadiran Polri sebagai penyidik tidak seharusnya menakutkan masyarakat yang bukan pelanggar hukum, demikian halnya proses penyidikan terhadap pelanggar hukum harus dimaknai dalam kerangka perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bilamana persepsi masyarakat terhadap tugas Polri sebagai sosok yang menakutkan, harus segera disadari oleh anggota bahwa hal tersebut sebagai suatu dampak negatif yang harus segera dihilangkan. Adapun cara bertindak yang harus dilakukan oleh setiap personel di seluruh jajaran Kepolisian R.I. untuk menghilangkan kesan menakutkan tersebut, sebagaimana arahan Kapolri Jenderal



Polisi Drs. Sutanto adalah sebagai berikut:

1. Tetap menghormati HAM dengan menempatkan posisi tersangka dalam koridor asas "praduga tak bersalah".
2. Menerapkan ketentuan KUHAP secara benar dan menjunjung tinggi harkat dan martabat tersangka sebagai manusia ciptaan Tuhan dan tetap memperhatikan etika kesopanan.
3. Memberi penjelasan tentang penyidikan kasusnya kepada tersangka dan keluarganya.
4. Agar seluruh penyidik menghindari penyalahgunaan wewenang.

Apabila cara bertindak sebagaimana arahan Kapolri seperti tersebut di atas ditampilkan oleh penyidik Polri secara terus menerus dan konsisten, akan dapat mengeliminasi rasa takut masyarakat terhadap Polri dan sekaligus membangun sosok Polri yang simpatik dalam menjalankan tugas penyidikan tindak pidana. Segala rintangan yang menghalangi penegakan hukum harus disingkirkan dan perjuangan bangsa untuk membebaskan diri dari cengkeraman tindakan korupsi yang sangat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat harus terus dilaksanakan dengan penuh semangat dan dimuati dengan amanah "panggilan suci" untuk bangsa dan negara kesatuan R.I.

Dalam proses penyidikan kita harus cerdas dalam menyiasati segala hambatan yang ada, selalu menyatu padukan segala kekuatan dan kualitas aparat penyidik tindak pidana korupsi serta aparat terkait lainnya melalui cara-cara yang proporsional dan profesional sehingga tidak lagi terjadi lagi lolosnya pelaku dengan hasil korupsi yang disembunyikan ke luar negeri.***

ASPEK KUALITAS DAN KUANTITAS MERUPAKAN PRIORITAS DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA POLRI

MARAKNYA tuntutan demokrasi tanpa diimbangi dengan pemahaman yang baik akan kewajiban-kewajiban azasi masyarakat telah membentuk anarkhisme yang berdampak munculnya berbagai friksi baik antar elemen masyarakat secara horisontal maupun secara vertikal yaitu terhadap institusi pemerintahan termasuk Polri.

Kesulitan ekonomi yang melilit kehidupan masyarakat telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai tindak kejahatan sebagai upaya untuk mempertahankan hidup dalam suasana yang serba sulit.

Polri selaku pengemban fungsi kamtibmas dituntut mampu mengatasi setiap tantangan yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat. Untuk menjawab setiap tantangan tersebut aspek kualitas dan kuantitas personel Polri merupakan prioritas sasaran dari kebijakan Kapolri di bidang sumber daya manusia.

Kebijakan dan strategi pembinaan SDM Polri pada hakekatnya merupakan implementasi dari strategi Polri dalam konteks perubahan menuju paradigma baru Polri sebagai tuntutan reformasi nasional yaitu mewujudkan personel Polri yang bersih dan bermoral. Tergelar di semua kegiatan masyarakat untuk memberikan pelayanan dengan berperilaku mahir, terpuji dan patuh hukum.

Kebijakan Kapolri dengan

menerapkan *Local Boy for The Local Job* serta desentralisasi kebijakan dari pusat ke daerah diharapkan mampu mengurangi penyimpangan yang berkaitan dengan kegiatan rekrutmen anggota Polri. Salah satu bentuk pelimpahan kewenangan adalah dalam penentuan kelulusan seleksi penerimaan untuk pendidikan Bintara, calon taruna Akpol dan PPSS diserahkan kepada Kapolda.

Untuk meningkatkan kualitas personel, Polri mengembangkan bentuk dan metode pendidikan dan latihan, kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri dalam rangka *sharing knowledge*, menerapkan konsep *meryt system* yaitu memberikan kompensasi yang proposional serta memotifasi kompetisi positif diantara anggota Polri dengan memberikan reward.

Berdasarkan arahan De SDM pada Upacara Bendera Bulanan tanggal 17 April 2006, kepada kasatwil/kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lakukan transparansi dalam rekrutmen guna meredam gejolak masyarakat.
2. Tegakkan budaya reward dan punishment terhadap anggota.
3. Perhatikan kebutuhan dasar baik berupa kesejahteraan moral dan materil.***

Kenaikan Santunan Biaya Pemakaman Bagi Anggota Polri dan PNS

DALAM upaya meningkatkan kesejahteraan anggota Polri dan PNS adalah dengan cara menaikkan besarnya manfaat santunan biaya pemakaman atas kematian istri/suami (SBPI/S) dan santunan biaya pemakaman atas kematian anak (SBPA) peserta aktif/pensiunan anggota Polri dan PNS yang meninggal dunia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Menteri Pertahanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/778/M/VIII/2005 tentang kenaikan besarnya manfaat Santunan Biaya Pemakaman bagi anggota Polri dan PNS yang meninggal dunia setelah pensiun dan pemberian manfaat santunan biaya pemakaman atas kematian istri/suami/anak peserta aktif/pensiunan anggota Polri dan PNS yang meninggal dunia.

Adapun keputusan surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengertian peserta Asabri, isteri/suami dan anak dari peserta

Asabri, ahli waris, kantor bayar dan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP).

2. Manfaat Santunan Biaya Pemakaman (BP) atas kematian peserta.
3. Manfaat Santunan Biaya Pemakaman atas kematian istri/suami (SBPI/S) dan anak (SBPA).
4. Kenaikan besar manfaat SBP dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi pensiunan peserta yang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2005 dan sesudahnya.
5. Besar manfaat Santunan Biaya Pemakaman atas kematian istri/suami (SBPI/S) peserta Asabri aktif/pensiunan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Besar manfaat Santunan Biaya Pemakaman atas Kematian Anak (SBPA) peserta Asabri aktif/pensiunan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

7. Bagi pensiunan peserta asabri yang meninggal dunia sebelum tanggal 1 Januari 2005 belum mendapatkan santunan tersebut.

8. Bagi pensiunan peserta asabri yang meninggal dunia setelah tanggal 1 Januari 2005, ahli warisnya akan mendapat santunan.

9. Pembayaran besarnya manfaat sbp atas kematian bagi pensiunan Asabri dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Bagi ahli waris yang tidak memiliki KTPA (Kartu Tanda Peserta Asabri) asli, harus melampirkan : surat pengajuan pembayaran (SPP) dari ahli waris, fotokopi SK pensiun peserta, fotokopi Surat Kematian dari dokter atau Lurah, surat keterangan ahli waris dari Lurah, surat keterangan hilang dari Kepolisian atau surat keterangan belum memiliki ahli waris, surat pernyataan bermaterai dari ahli waris, fotokopi KTP yang masih berlaku.
- b. Bagi ahli waris yang memiliki kartu tanda peserta Asabri



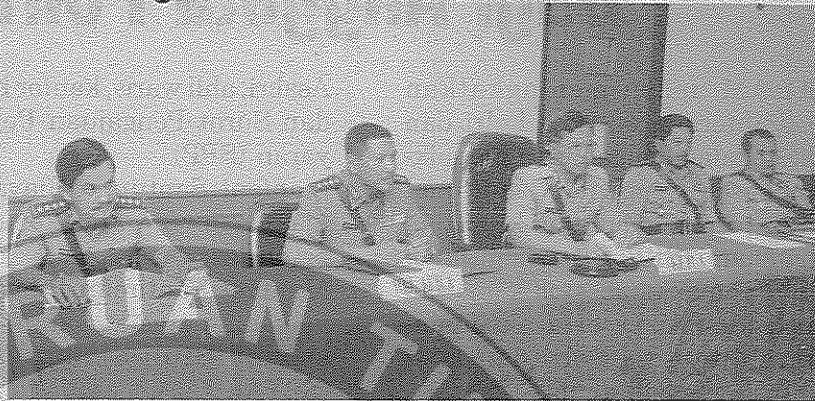
terhitung 1 April 1989 melampirkan : SPP dari Ahli Waris, fotokopi SK Pensiun peserta, fotokopi Surat Kematian dari dokter/Lurah, surat keterangan Ahli Waris dari Lurah, Kartu Asabri asli, fotokopi ktp peserta/ahli waris yang masih berlaku.

10. Pembayaran santunan biaya pemakaman atas kematian istri/suami dan anak, diajukan ke Kantor Pusat/Cabang PT. Asabri dengan melampirkan : SPP dari peserta/ahli waris, fotokopi Kartu Asabri aktif/SK Pensiun, fotokopi Surat Kematian istri/suami/anak dari dokter/Lurah, fotokopi Surat Keterangan tanggungan keluarga dari kesatuan, Surat Keterangan pembayaran gaji dari pekas kesatuan, Fotokopi Kartu Asabri, fotokopi KTP.
11. Seluruh fotokopi dokumen disahkan oleh Kasatker.
12. Petunjuk pelaksanaan akan diatur dalam keputusan Direksi PT. Asabri.

Berkaitan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Skep/778/M/VII/2005 tersebut diatas, kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Skep/778/M/VII/2005 tentang kenaikan besarnya manfaat santunan biaya pemakaman bagi anggota Polri dan PNS yang meninggal dunia setelah pensiun dan pemberian manfaat santunan biaya pemakaman atas kematian istri/suami/anak peserta aktif/pensiunan anggota Polri dan PNS yang meninggal dunia
2. Menginformasikan serta mensosialisasikan surat keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Skep/778/M/VII/2005 kepada seluruh anggota di wilayah jajarannya.
3. Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.***

Penyelesaian Perkara Guna Kelancaran Tugas dan Ketertiban Personil



KEBERHASILAN pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada anggota Polri, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan ketrampilan teknis Kepolisian juga sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Polri.

Tidak bisa dipungkiri bahwa anggota Polri adalah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku, misalnya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, guna kelancaran tugas dan kelancaran penyelesaian perkara serta ketertiban personil, maka kepada kasatwil/kasatker ditekankan untuk :

1. Tidak mengizinkan dan tidak memerintahkan setiap anggotanya yang terlibat pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana untuk melaksanakan mutasi, pendidikan, promosi jabatan selama perkara dari oknum anggota Polri tersebut belum mendapatkan penyelesaian dari badan peradilan yang berwenang.

2. Setiap adanya perkara/kasus anggota, baik itu pelanggaran disiplin, kode etik, dan pidana agar diselesaikan dengan cepat, tepat dan tuntas sampai mendapatkan keputusan yang tetap sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

3. Terhadap anggota bermasalah yang telah mendapatkan putusan hukuman dan kepastian hukum yang tetap, setelah 6 (enam) bulan pengawasan untuk mendapatkan rekomendasi penilaian status, maka terhadap personil tersebut dapat ditingkatkan pembinaan kariernya.

4. Terhadap anggota yang bermasalah, baik yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik yang telah terlanjur dimutasikan ke kesatuan baru, maka menjadi kewajiban Anknun kesatuan baru untuk menyelesaikan dan menyelenggarakan sidang disiplin/kode etik, sedangkan bagi anggota yang melakukan pelanggaran tindak pidana penyelesaian perkaranya tetap menjadi tanggung jawab kesatuan lama (sesuai locus delicti).***

Tauladani Sikap Dan Perilaku Rasulullah dalam Kehidupan Sehari-Hari

TUGAS Polri kedepan akan semakin berat, maka sejak kemadirannya Polri telah melakukan perubahan dan pembenahan secara bertahap dalam 3 aspek. Pertama, aspek struktural mencakup perubahan kelembagaan Polri (institusi Kepolisian) dalam ketatanegaraan, yang mana organisasi dan kedudukannya saat ini langsung di bawah presiden. Kedua, aspek instrumental antara lain mencakup filosofi, visi, misi dan tujuan serta doktrin. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya yakni aspek kultural untuk mewujudkan kualitas pelayanan polri guna memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Dari ketiga aspek tersebut, merubah aspek kultural adalah hal yang paling sulit, dan ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, karena di dalam aspek kultural menggambarkan budaya kepolisian yang secara langsung ditanggapi oleh masyarakat berupa pujian, perasaan puas atau dengan celaan karena kecewa atau ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap dan perilaku Polri. Demikian antara lain sambutan Kapolri pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan di ruang Bhayangkari Mabes Polri tanggal 16 Mei 2006 lalu.

Lebih jauh Kapolri dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut diwakili oleh Wakapolri, menyatakan paradigma kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah berubah, cita-cita pemerintahan yang bersih "*good government*" yang profesional, akuntable dan transparans tetap menjadi tuntutan masyarakat. Demikian pula tuntutan pelayanan Polri kepada masyarakat, saat ini semakin berkembang dan kritis. Namun syukur alhamdulillah berkat rahmat dan ridho Allah

SWT, Polri masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, beberapa indikator yang menunjukkan kearah tersebut, antara lain pengungkapan kasus bom di beberapa wilayah di Indonesia, penyelesaian kasus di beberapa daerah konflik dan lain-lain. Prestasi Polri, baik tingkat Nasional maupun internasional yang sudah memperoleh pengakuan dari berbagai pihak, namun saya harapkan keberhasilan ini tidak menjadikan diri kita berpuas diri, dan lupa

untuk selalu berbenah diri.

Selanjutnya di sisi lain kita tidak menutup mata, bahwa masih ada beberapa oknum pegawai pada polri yang telah melakukan perbuatan tercela yang pada akhirnya dapat menodai citra polri di mata masyarakat, untuk itu saya himbau marilah kita saling mengingatkan utamanya kepada para anggota yang bertugas di lapangan, agar selalu dapat menjaga sikap dan perilakunya di tengah-tengah masyarakat pada saat bertugas, sehingga perbuatan-perbuatan tercela tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Saya menginginkan pada diri kita masing-masing untuk ikut serta dalam menciptakan polri yang profesional, tangguh, beriman dan berakhlakul karimah.

Pada bagian lain Kapolri menyatakan bahwa peringatan hari Bhayangkara tahun 2006 kali ini dilakukan berbeda dibanding tahun-tahun yang lalu, tanpa mengurangi kebanggaan dan kehormatan Polri, penyelenggaraannya akan kita lakukan dengan "*paradigma baru*". Prinsip memberikan contoh kesederhanaan dan keinginan membesarkan nama baik Polri di masyarakat dengan cara menyentuh langsung harapan dan keinginan/kebutuhan masyarakat akan dilakukan dalam rangkaian hari Bhayangkara tersebut. Melalui kemitraan Polri dengan masyarakat akan kita bangun "*community policing*" atau "*perpolisian masyarakat (Polmas)*", utamanya dalam melakukan upaya pre-emptive yaitu melalui pemecahan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (problem solving) yang berimplikasi bisa menimbulkan gangguan kamtibmas.

Mengakhiri amanatnya Kapolri menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang setiap tahunnya di peringati di seluruh jajaran Polri, termasuk juga di lingkungan Mabes Polri. Untuk tahun 2006 M mengambil tema *Dengan Ketauladanan Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kita Jadikan Panutan Dalam Berperilaku Sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat Dan Pemelihara Kamtibmas Serta Penegak Hukum*". Dalam acara Maulid tahun ini telah dilaksanakan pula khitanan massal, pemberian bantuan/santunan kepada keluarga Brimob yang gugur dalam tugas dan pemberian modal usaha kepada warakawuri. Bantuan ini hendaknya dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk sekedar meringankan beban kebutuhan sehari-hari.***

Peningkatan Kualitas Keimanan Diikuti Dengan Pelayanan Yang Profesional

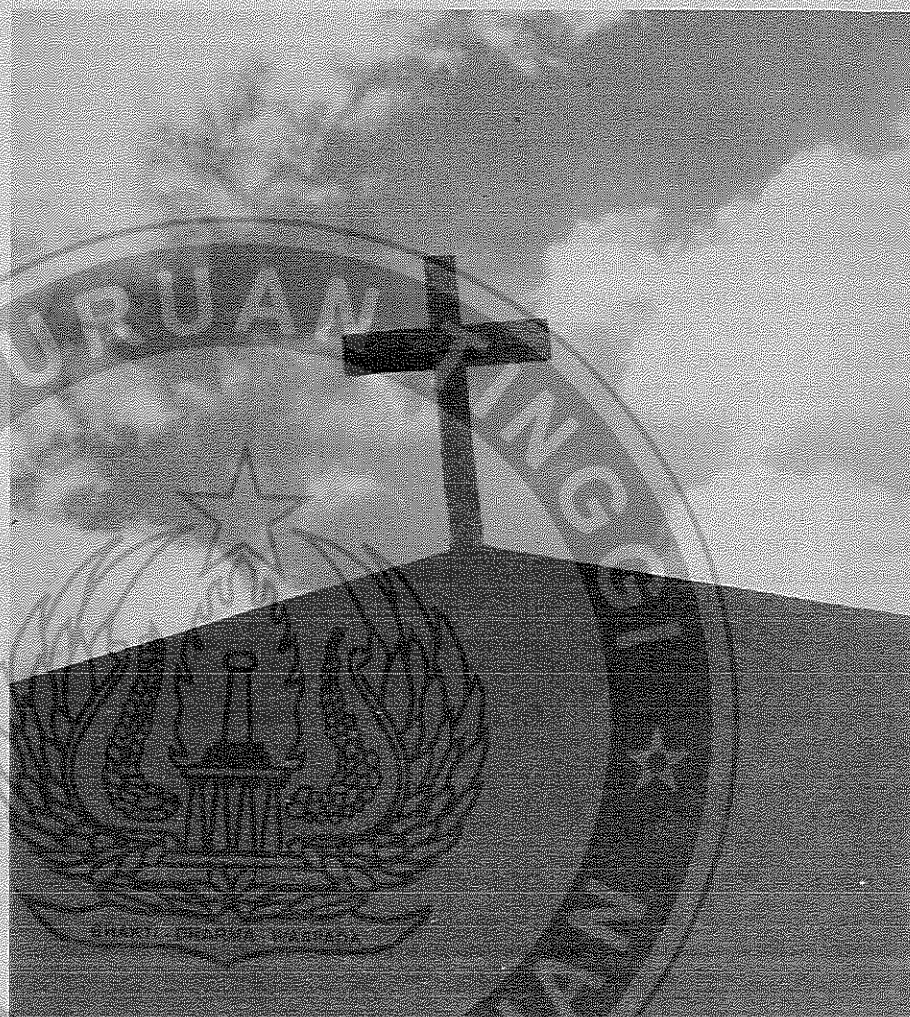
UPAYA peningkatan kualitas keimanan dan kualitas kepribadian sebagai personil Polri yang profesional harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, sehingga mampu melaksanakan visi dan misinya untuk memberikan pelayanan terbaik di tengah masyarakat

Dalam konteks tugas pengabdian sebagai abdi negara, Polisi sebagai anggota Bhayangkara tetap teguh, tidak perlu takut menegakkan hukum, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat serta menegakkan keadilan; demikian sebuah ajakan dari Pdt Dr. Ricard M Daulay, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja di Indonesia (Sekum PGI), dalam pesan Paskahnya kepada Keluarga Besar Umat Kristiani dilingkungan Mabes Polri di Wisma Bhayangkari, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Hari Paskah sebagai hari kemenangan karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian-Nya. Bagi umat beriman, kematian hanya sebagai tempat lewat, jembatan menuju tujuan akhir hidup, *"Hidup yang kekal di sorga,"* ucap Pendeta di hadapan Umat Kristiani. Dengan mengutip Injil 1 Korintus 15:58 yang mengatakan; *"Saudara-saudaraku yang terkasih berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dari persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia"*.

Makna Paskah

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Umum Persekutuan Gereja di Indonesia mengatakan bahwa dengan semangat Paskah, Polisi saat ini mulai dipuji. *"Dipuji karena prestasi, sudah mampu meredam berbagai kejahatan di*



tengah-tengah masyarakat. Para bandar judi, mulai tiarap. Tukang tukang kompas di jalan-jalan mulai berhenti, maka rasa aman bagi masyarakat mulai tumbuh," memberikan dukungan. Umat Kristiani sebagai warga Bhayangkari, kata Ricard, warga Kristiani Mabes Polri harus mampu untuk merenungkan makna perayaan Paskah ini. Untuk menjadi pengawal dan pemberi rasa aman yang sangat didambakan oleh seluruh warga masyarakat di Indonesia. *"Kami berdoa untuk Polisi, supaya polisi kami sungguh-sungguh menjadi tempat kami mencari rasa aman di dunia ini. Tapi juga rasa aman yang didambakan kami adalah rasa*

aman oleh Tuhan dan Polisi," ucapnya. *"Saya atas nama umat Kristiani di Indonesia menyampaikan pujian kepada Kapolri dan kepada seluruh jajaran aparat orang yang telah menjamin terciptanya kondisi tersebut,"* paparnya di hadapan Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri saat, menutup renungan Paskahnya.

Meneladani sikap Yesus

Perayaan Paskah yang setiap tahun diperingati ini adalah peristiwa bersejarah bagi umat Kristiani dalam meneladani sikap pengorbanan Yesus Kristus untuk penebusan dosa umat-Nya sebagai wujud rasa kasih sayang terhadap umatNya. Pada kesempatan terse-

but, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto, menyampaikan pesan yang dibacakan Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Drs. Adang Daradjatun. Kapolri mengingatkan bahwa, "Momen tersebut dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan introspeksi atas perwujudan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya dapat memperbaiki diri dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan melalui sikap dan tingkah laku serta perbuatan nyata dalam memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan baik dalam tugas maupun dalam hubungan kemasyarakatan dengan sesama manusia". Pemaknaan perayaan seperti ini, kata Sutanto, akan semakin meningkatkan kualitas keimanan dan dapat menjadi pendorong dalam melakukan tugas yang lebih baik. Saya yakin bahwa pelaksanaan tugas yang baik, merupakan wujud ketaatan terhadap ajaran Yesus yang selama hidupnya menunjukkan sikap jujur, sederhana, peduli kepada sesama manusia serta rela berkorban, memberikan rasa aman dan damai kepada setiap orang. Ajaran dan sikap keteladannya, lanjut Kapolri, "*hendaknya menjadi pedoman bagi setiap umat Kristiani di lingkungan Polri dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari*".

Makna jati diri Polri

Dengan tema: "*Dengan Semangat Paskah Kita Tingkatkan Sikap Dan Perilaku Terpuji Dalam Melindungi, Mengayomi Dan Melayani Masyarakat serta Penegakan Hukum*". Menurut Sutanto, menyiratkan makna tentang jati diri Polri sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kita bisa berharap bahwa akan mampu melaksanakan visi dan misinya untuk memberikan pelayanan terbaik di tengah masyarakat dan akan mampu membantu terciptanya persatuan dan kesatuan. "*Dengan*

Kapolri : Ajaran dan sikap keteladannya, "hendaknya menjadi pedoman bagi setiap umat Kristiani di lingkungan Polri dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari".

kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan terwujud tatanan masyarakat yang serasi, seimbang, dan harmonis antarsesama umat beragama yang pada gilirannya akan diwujudkan stabilitas nasional yang mantap," tegasnya. Sejalan dengan itu, Kapolri, mengajak Umat Kristiani di Lingkungan Polri, baik PNS maupun anggota Polri, melakukan upaya peningkatan kualitas keimanan dan kualitas kepribadian sebagai personil Polri yang profesional harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap unsur pimpinan dan setiap jajaran kepolisian.

Dilandasi ketulusan-keimanan

Pada bagian lain sambutan Kapolri, mengingatkan pula, kegiatan yang bernafaskan keagamaan, diharapkan dapat menjadi pendorong kepada kita masing-masing, karena pengabdian yang dilandasi ketulusan dan keimanan kepada Sang Pencipta, saya yakin semua agama menganjurkan umat-Nya untuk menciptakan rasa persaudaraan, rasa perdamaian, rasa persatuan dan kesatuan serta berbuat baik untuk kesejahteraan bersama. "*Saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih atas segala pengorbanan dan dedikasinya. Karena secara tidak langsung sebagai usaha meningkatkan keimanan, ketakwaan dan mengembangkan*

nilai-nilai kejujuran, pengabdian, kerelaan untuk berkorban bagi sesamanya di kepolisian dan umat Kristiani pada khususnya," ucapnya kepada Panitia Paskah 2006 yang menyelenggarakan Paskah Bersama Umat Kristiani di Lingkungan Mabes Polri. Dari lubuk hati yang dalam atas nama seluruh jajaran Polri saya menyampaikan "*Selamat Paskah Tahun 2006, semoga semangat Paskah akan meningkatkan pengabdian selaku anggota Polri,*" Kapolri mengakhiri amanatnya.

Memacu semangat

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Paskah Bersama Umat Kristiani, Komisaris Besar (Kombes) Pol Drs. Roy Remond menekankan dalam acara religius ini, "*sangatlah penting dan berarti. Karena mampu memberikan dorongan moril dan memacu semangat dalam melakukan tugas sebagai anggota Polri*". Sesuai tema Paskah tersebut, maka dalam perayaan acara religius tahun 2006 di jajaran Mabes Polri dilangsungkan kebaktian dan perayaan Paskah secara sederhana dan penuh persaudaraan dan keakraban. Terima kasih juga disampaikan kepada Kapolri dan Wakpolri, para pejabat utama Mabes Polri walaupun di tengah kesibukan, berkenan menghadiri perayaan Paskah bersama umat Kristiani di lingkungan Mabes Polri. Juga bagi semua pihak yang membantu bagi terlaksana perayaan Paskah tahun ini, dengan dukungan moril dan materil. "Untuk itu, segenap panitia dan seluruh umat Kristiani mengucapkan terima kasih yang tak terhingga," ucapnya. Pada perayaan Paskah kali ini, dimeriahkan dengan pujian-pujian bersama paduan suara dari Polwan Mabes Polri, Sepolwan, Selapa Polri, Monica dan Albert. Uang persembahan yang terkumpul dalam acara tersebut, sebesar Rp 4.187.000 akan diserahkan ke Panti Asuhan. *****

KOMENTAR MASYARAKAT

60 Tahun POLRI

TANGGAL 1 Juli 2006 adalah Hari Bhayangkara. 60 tahun sudah usia POLRI, berbagai upaya dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsinya sebagai Pengayom, Pelindung dan Pelayan masyarakat serta Penegakan Hukum sudah dilakukan melalui kinerja baik dipusat/kota maupun di daerah/wilayah, walaupun didalam upaya tersebut masih belum mendapatkan hasil maksimal ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan dan keinginan masyarakat untuk Polri. Polri yang selalu didambakan masyarakat didalam memberikan solusi terhadap permasalahannya, disambut baik, meski dalam keterbatasannya tersebut Polri telah berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam upaya pemberian pelayanan berikut pendapat masyarakat tentang kinerja Polri selama 60 tahun yang dihimpun oleh Tim Redaksi, berikut pelikannya:

Edy Ginting (Wartawan) : Semakin Baik

Sebagai seorang wartawan saya sering melakukan liputan ke luar kota/daerah dari Aceh hingga Papua, saya lihat dan rasakan jauh lebih baik. Begitu juga masyarakat yang saya temui di lapangan mengkui bahwa Polri sudah semakin baik kinerjanya baik

Polri yang ada di Pusat/kota maupun di daerah-daerah (satwil).

Masyarakat belum terlalu paham apa yang dimaksudkan dengan pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, mereka hanya tau ingin mendapatkan pelayanan dari kepentingan langsung seperti pelayanan dibidang Lantas (lalu lintas) dan pelayanan penanganan perkara dan kasus-kasus. Dari sifat-sifat buruk yang dikenal masyarakat terutama pelayanan lalu lintas jauh lebih berkurang. Dari sisi penanganan berbagai kasus (penyelidikan/penyidikan) saya juga melihat sudah semakin proporsional dan professional. Polri saat ini sudah tidak tampak seperti pada masa-masa sebelumnya. Polri sudah tidak menjadi alat penguasa/kekuasaan tetapi sudah menjadi alat negara.

Kinerja maupun kemampuan Polri di kota dan di daerah masih nampak ada perbedaan, baik berupa wawasan dan kemampuan pelaksanaan tugas kepolisian. Maka saya berharap untuk Polisi dipusat supaya selalu memberikan perhatian terhadap Polisi di daerah terutama di pedesaan, agar harapan masyarakat terhadap kinerja Polisi di daerah bisa maksimal.

Polri juga dapat lebih meningkatkan fungsinya sebagai Pengayom, Pelindung dan Pelayan masyarakat serta penegakan hukum dan jangan Lagi Polri sebagai alat penguasa/kekuasaan, tetapi harus bertindak diatas kebenaran.***

Bapak Benny – Wiraswastawan

Masih Ada Pungli

POLRI pada usia 60 tahun, bertepatan pada kepemimpinan Bapak Jenderal Polisi Sutanto melakukan satu gebrakan yang sangat mengejutkan dan signifikan dari berbagai pihak. Kapolri dengan tegar dan mantap serta penuh keyakinan memberantas perjudian, narkoba dan korupsi. Tampaknya Kapolri sekarang lebih peka dari Kapolri sebelumnya.

Mengenai kinerja saya melihat banyak peningkatan. Polri telah berusaha melakukan yang terbaik sesuai tugas dan fungsinya yaitu Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat serta penegakan hukum. Meskipun belum dapat memberikan yang terbaik, mungkin ini disebabkan beberapa kendala yang ada pada Polri sendiri. Misalnya saja masalah kesejahteraan yang masih minim. Akibat dari kesejahteraan yang masih minim tadi maka masih ada saja oknum yang suka melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti "pungli dijalan" dan "main belakang".

Untuk pelayanan dari Bimasnya sudah baik, Polisi sudah berusaha melakukan pendekatan dengan masyarakat. Pelayanan dibidang Reskrim saya sendiri tidak begitu faham, karena saya belum pernah berurusan dengan Polri masalah yang melibatkan anggota Polri dari satuan Reskrim. Saya hanya melihat dari Media Massa baik elektronik maupun cetak.

Pelayanan publik dari Kepolisian masih dirasa kurang, saya tidak tau apa sebabnya. Dibidang Lantas masih ada yang perlu dibenahi terutama masalah "pungli" masih belum bisa hilang, untuk itu kepada oknum yang masih suka melakukan "pungli" tersebut perlu ada pembinaan dan pengarahan yang lebih mengarah. Pelayanan publik masalah SIM masih diperlukan pembenahan-pembenahan. Sudah beberapa kali ganti Kapolri, masalah SIM/STNK, kebijakan/pengangaannya sudah beberapa kali pula dilakukan perubahan dan peningkatan yang mengarah kepada hal-hal yang "meringankan" masyarakat. Namun dari kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat diterima masyarakat terutama dari birokrasi pelayanannya.

Masalah pengelolaan/penerbitan SIM/STNK yang tergolong

KOMENTAR MASYARAKAT

60 Tahun POLRI

pada pelayanan public bagus tidaknya biarkah masyarakat yang menilai. Kalaupun dipindahkan atau tidak dari Polri, yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalaupun SIM/STNK itu diterbitkan oleh siapa saja, yang penting tidak lagi ada "kongkalikong". Tetapi yang berpendapat untuk administrasi SIM/STNK itu masih diperlukan di institusi Polri.

Polri diharapkan agar lebih dekat dengan masyarakat, Polri harus lebih kuat dan solid dari Polri sebelumnya. Polri harus mengajak rakyat/masyarakat untuk bersama membangun Polri yang Profesional dan proporsional.

Semoga !!!HarHaHHHarahhhh

Ratna Ambardianti

(Mahasiswa, Universitas Sahid Jakarta)

Tingkatkan Keamanan

POLRI selama ini dalam menjalankan tugasnya masih kurang, karena masyarakat masih saja mengeluhkan banyaknya kejahatan seperti perampokan, pencopetan dengan cara menghipnotis korbannya untuk melancarkan aksinya. Ini sering terjadi di atas kereta api maupun kendaraan lainnya.

Seharusnya didalam kereta tersebut ditugaskan dua atau empat orang untuk mengawasi setiap pelaku kejahatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam

memberantas kasus Narkoba seharusnya di berantas sampai keakar-akarnya. Jangan hanya dari pengedar maupun dari pemakainya saja. Juga kasus perjudian seharusnya polisi memberantas jangan menjadi deking para bandar supaya tidak ada lagi perjudian di negara kita.

Semoga sukses selalu

dan selamat Ulang Tahun Polri yang ke 60

Desi Destryna (Mahasiswa, Universitas Sahid Jakarta)

Tugas Berat

MENURUT saya citra Kepolisian di Indonesia sekarang ini dibandingkan dengan tahun-tahun lalu sudah semakin baik. Karena semakin bertambah usia, semakin baik hasil yang dicapai. Misalnya dalam memberantas kasus-kasus korupsi. Banyak sekali pejabat-pejabat negara kita yang melakukan

korupsi dalam instansinya masing-masing. Kita sebut saja kasus korupsi yang sedang hangat dibicarakan yaitu penangkapan DIRUT PT PLN karena telah menggelapkan dana negara sebesar milyaran rupiah.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil kerja keras dari Kepolisian negara kita. Kasus penangkapan DIRUT PT PLN tersebut dapat membuat citra atau image Kepolisian menjadi bertambah baik di mata masyarakat Indonesia dan juga masyarakat menjadi percaya kepada polisi, bahwa tidak ada suap menyuap di dalam kasus ini.

Tentu saja hal tersebut menjadi salah satu kebanggaan bagi Kepolisian Indonesia. Masyarakat menjadi percaya bahwa tugas yang dilakukan Kepolisian memang berat dan masyarakat yakin bahwa semua yang dilakukan Kepolisian itu dapat dikerjakan dengan baik dan berhasil. Semoga dengan umur yang ke 60 tahun ini citra Kepolisian akan semakin lebih baik lagi. ***

Suharlina (Ibu Rumah Tangga)

Merasa Aman

POLRI yang sudah berusia 60 th pada 1 Juli 2006, Polri agar lebih ditingkatkan pelayanan, masyarakat lebih membutuhkan kehadiran Polisi agar merasa aman dan tenteram Polisi harus lebih tegas terhadap segala kejahatan sehingga masyarakat lebih terayomi. ***

Ringga Lestari (Mahiswi Universitas Sahid, Jakarta)

Hilangkan Sikap Arogan

DALAM usianya yang telah mencapai 60 tahun ini diharapkan Polri lebih mampu memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk masyarakat yang membutuhkan pengamanan dengan menghilangkan sikap arogannya. Apalagi Polri (oknum) masih memiliki citra dan pandangan yang kurang baik di mata masyarakat luas.

Untuk itu setiap anggota Polri harus lebih harmonis dan memberikan yang terbaik sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. ***

Selamat Hari Bhayangkara ke 60 !!
Semoga tetap jaya.

Maklumat Ke-Indonesiaan

KITA bersama-sama di sini, untuk menegaskan kembali Indonesia tempat kita berdiri. Indonesia sebagai sebuah warisan yang berharga, tapi juga sebuah cita-cita. Indonesia yang bukan hanya amanat para pendahulu, tapi juga titipan berjuta anak yang akan lahir kelak.

Kita bersama-sama disini, untuk menyadari kembali, bahwa Indonesia adalah satu prestasi sejarah namun juga proyek yang tak mudah. Dalam banyak hal, tanah air ini belum rampung. Tetapi sebuah masyarakat, sebuah negeri, memang proses yang tak akan kunjung usai. Seperti dikutip Bung Karno, bagi sebuah bangsa yang berjuang, tak ada akhir perjalanan.

Dalam perjalanan itu, kita pernah mengalami rasa bangga tetapi juga trauma, tersentuh semangat yang berkobar tapi juga jiwa yang terpuruk. Namun baik atau buruk keadaan, kita bagian dari tanah air ini dan tanah air ini bagian dari hidup kita : **"Disanalah kita berdiri, jadi pandu ibuku".**

Disanalah kita berdiri : di awal abad ke 21, disebuah zaman yang harus mengharuskan kita tabah dan berendah hati. Abad yang lalu telah menyaksikan ide-ide besar yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, namun akhirnya gagal membangun sebuah masyarakat yang dicita-citakan. Abad yang penuh harapan, tapi juga penuh korban. Abad sosialisme yang datang dengan agenda yang luhur, tapi kemudian melangkah surut. Abad kapitalisme yang membuat beberapa negara tumbuh cepat, tapi memperburuk ketimpangan sosial dan ketidakadilan internasional. Abad Perang Dingin yang tak ada lagi, tapi tak lepas dari konflik dengan darah dan besi. Abad ketika arus informasi terbuka luas, tapi tak selalu membentuk sikap toleran terhadap yang beda.

Dengan demikian memang sejarah tak berhenti, bahkan perjalanan semakin cepat. Teknologi, pengetahuan tentang manusia dan lingkungannya, kecenderungan budaya dan politik, berubah begitu tangkas, hingga persoalan baru timbul sebelum

jawaban buat persoalan lama ditemukan.

Kini makin jelaslah, tak ada doktrin yang mudah dan mutlak untuk memecahkan problem manusia. Tak ada formula yang tunggal dan kekal bagi kini dan nanti. Yang ada, yang dibutuhkan, justru sebuah sikap yang menampik doktrin yang tunggal dan kekal. Kita harus selalu terbuka untuk langkah alternative. Kita harus selalu bersedia mencoba cara yang berbeda, dengan sumber-sumber kreatif yang beraneka.

Sejarah mencatat, Indonesia selalu mampu untuk demikian sebab Indonesia sendiri, 17 ribu pulau yang berjajar dari Barat sampai ke Timur, adalah sumber kreatif yang tumbuh dalam kebhinekaan.

Para Ibu dan Bapak pendiri republik dengan arif menyadari hal itu. Itulah sebabnya Pancasila digali, dilahirkan dan disepakati di hari ini, 61 tahun yang lalu.

Tidak, Pancasila bukanlah wahyu dari langit. Ia lahir dari jerih payah dalam sejarah. Ia tumbuh dan dari benturan kepentingan, sumbang-menyumbang gagasan, saling mendengar dalam bersaing dan berembuk. Dengan demikian ia mengakui perbedaan manusia dan ketidak sempurnaannya. Ia tak menganggap diri doktrin yang maha benar. Tapi justru itulah sebabnya kita menegakkannya, sebab kita telah belajar untuk tidak jadi manusia yang menganggap diri maha benar.

Maka Indonesia tak menganggap Pancasila sebagai agama sebagaimana Indonesia tidak pernah dan tidak hendak mendasarkan dirinya pada satu agama apapun. Nilai luhur agama-agama mengilhami kita, namun justru karena itu, kita mengaku ketebatasan manusia. Dalam keterbatasan itu, tak ada manusia yang bisa memaksa, berhak memonopoli kebenaran, patut menguasai percakapan.

Maka hari ini kita tegaskan kembali Indonesia sebagai cita-cita bersama, cita-cita yang belum selesai. Maka hari ini kita berseru, agar bangun jiwa Indonesia, bangun badannya dalam berbeda dan bersatu!

Jakarta, 1 Juni 2006.



Presiden Bentuk Kopolnas



PRESIDEN akhirnya mengeluarkan Keputusan Presisiden Nomor 50/M/2006 tertanggal 19 Mei 2006 tentang Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Pembentukan ini didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2002 tentang Polri.

Wakapolri Komjen Pol. Drs. Adang Daradjatun dalam jumpa persnya mengatakan, Kopolnas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Komjen Pol Drs. Adang, sebagai ketua panitia pelaksana pemilihan, mengatakan Komisi ini merupakan upaya Polri dalam meningkatkan transparansi dan profesionalitas Polri. Melalui komisi tersebut diharapkan fungsi kontrol publik terhadap Kepolisian dapat berjalan lebih efektif.

"Kita sangat terbuka terhadap kontrol masyarakat. Nanti kalau tidak dikontrol Polisi arogan lagi". Kopolnas akan menerima laporan apapun dari masyarakat. Namun jika memang ada dugaan itu, nanti Kepolisian akan selidiki, tapi Kopolnas tidak menyelidiki atau menyidik.

Untuk para penyelenggaraannya, Mabes Polri telah menerima sejumlah nama yang secara prerogatif oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, di dalamnya ada beberapa anggota yang sudah terpilih langsung atau ex-officio dan 6 anggota merupakan prerogatif Presiden,

Keenam anggota yang dipilih secara prerogatif itu adalah **Adnan Pandupradja, Novel Ali, Sukarni Ilyas, Ronny Lihawa, Laode Husen, dan Erlyn Indarti**. Kesemuanya berasal dari berbagai kalangan masyarakat, seperti para pakar

dan insan pers.

Sementara Ketuaanya adalah Menko Polhukam Widodo AS dan Wakil Ketua Mendagri M. Ma'ruf serta Menkum HAM Hamid Awaludin juga menjadi anggota selain 6 anggota lainnya. "mereka akan memberikan masukan kepada Polri, masukan tentunya dari masyarakat."

Menganai mekanisme kinerja Kopolnas, tidak akan overlapping dengan tugas Mabes Polri, yang jelas akan seperti komisi-komisi seperti biasanya, selain memberikan pertimbangan nama calon Kapolri, Kopolnas juga bertugas memberikan masukan kepada Presiden dalam mengambil kebijakan tentang Kepolisian dan menerima masukan dari masyarakat terkait kinerja Polri.

Polri siap bekerja sama dengan Kopolnas dan akan bersikap terbuka terhadap masukan masyarakat yang disampaikan lewat Kopolnas. Untuk mendukung kinerja Kopolnas, pemerintah akan menyediakan sekretariat yang dilengkapi dengan personelya serta dana APBN yang terpisah dari anggaran Polri.

Meski demikian, pembentukan lembaga Kopolnas ini dikritik hanya akan membuang anggaran negara, tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas Kepolisian.

"Tujuan pembentukan Kopolnas diharapkan membantu masyarakat untuk memberi masukan positif terhadap Polri". Kopolnas memberi masukan bagi petinggi Polri dalam mengambil keputusan dan kebijakan ke depan, dengan mengungkapkan data dan informasi yang dihimpun dari masyarakat ***.

Memburu Noordin M. Top

MESKIPUN perburuan terhadap tersangka teroris dan peledakan bom, Noordin M. Top sangat melelahkan Polisi tidak pernah menyerah, sejumlah upaya penangkapan dan penggerebekan dilakukan untuk menemukan buronan yang paling dicari.

Keseriusan Polri mengejar dan menangkap gembong teroris ini ditandai dengan diumumkannya sayembara pada tanggal 15 September 2004, bagi warga yang memberikan informasi aktual tentang keberadaan Noordin M. Top dan DR. Azahari akan diberi imbalan Rp. 1 miliar.

Penggerebekan di Batu Malang Jawa Timur pada tanggal 9 Nopember 2005, yang menewaskan DR. Azahari, kini tinggal Noordin M. Top dan jaringannya yang masih buron, Noordin dengan tinggi badan 173 cm, berbadan gempal dan berkulit kuning cerah, kelahiran Johor Malaysia, pada tanggal 11 Agustus 1969, memiliki ciri bercambang, logat bicara Melayu, dan tas kecil selalu menemaninya dalam beraktivitas.

Noordin M. Top memiliki peran yang lebih besar dari pada DR. Azahari, dimana DR. Azahari sebagai penasihat dan perakit-an bom, sedangkan Noordin M. Top menjadi ketua pelaksana, merangkap sebagai pendana, penyedia bahan peledak dan penyedia tenaga bom bunuh diri.

Noordin M. Top selama ini selalu lolos dalam penggerebekan, pada tanggal 30 Oktober 2003 bersama DR. Azhari bisa melarikan diri saat Polisi menggerebek rumah kost di Bandung, kepawaiian Noordin M. Top dalam meloloskan diri dari sergapan petugas membuktikan betapa hidupnya jaringan teroris yang dibentuk di Indonesia.

Operasi pencarian teroris di Jateng mulai gencar dilakukan Polisi sejak Juli 2003, Jl. Sri Rejeki VII di Kecamatan Semarang Barat kota Semarang menjadi awal dimulainya pemburuan jaringan teroris, dan hasilnya ditemukan ribuan butir peluru, senjata api, bahan peledak dan alat pembuat bom serta empat orang kelompok Noordin M. Top ditangkap.

Tahun 2005 Jateng seakan lautan yang siap ditebari jaringan menangkap jaringan kelompok teroris Noordin M. Top dan DR. Azahari, sejumlah penangkapan dan penggerebekan dilakukan, masyarakat dibuat terpana ketika mengetahui tetangga, kerabatnya terciduk dalam operasi. Perasaan



tidak percaya atas keterlibatan orang yang selama ini ada di sekitarnya seakan tidak pernah berakhir, ini membuktikan betapa rapinya jaringan teroris dibangun.

Tidak kurang dari 22 kali penangkapan dan penggerebekan digelar di Jawa Tengah pasca peledakan bom di Jimbaran dan Kuta Bali yang terjadi pada 1 Oktober 2005.

Pengejaran Noordin M. Top berlanjut ke Semarang, dimana sebelumnya didapat informasi ada kaki tangan Dr. Azahari dan Noordin M. Top bertindak sebagai kurir yang akan bertemu di Semarang dengan menggunakan bus dari Malang menuju Semarang, dan turun di persimpangan Genuk Semarang Jawa Tengah.

Dalam penggerebekan selain menangkap Mohammad Cholilli, berhasil pula ditangkap Hanif Solehuddin yang bertugas menjemput Mohammad Cholilli yang berboncengan dengan Teddy. Saat Teddy datang dengan mengendarai sepeda motor, pengejaran ditempat pertemuan antara Hanif dengan Teddy, namun Teddy membuang tembakan maka terjadilah baku tembak, kemudian Teddy menyandera seorang warga yang mengendarai sepeda motor yang berhenti, Teddy membawa sandernya melarikan sepeda motor yang dikendarainya kearah Semarang.

Berdasarkan informasi, dari keterangan Hanif Solehuddin mendapat informasi lokasi rumah persembunyian Noordin M. Top, dan hasil penggerebekan di rumah persembunyian Noordin M. Top, mendapatkan VCD

pernyataan ketiga pelaku bom bunuh diri Muhammad Salik Firdaus, Wisna alias Wasno, Aip Hidayat hal ini mengarah kepada keterlibatan jaringan Dr. Azahari dan Noordin M. Top dalam aksi bom bunuh diri di Kuta dan Jimbaran Bali, dimana Noordin M. Top sudah melarikan diri.

Penggerebekan pada tanggal 9 Nopember 2005 dilaksanakan setelah ada laporan bahwa tempat persembunyian di Villa Nova Jln. Flamboyan Indah Blok A/7 ada Dr. Azhari dan anggotanya, dalam penggerebekan Dr. Azhari dan Arman meninggal, Arman yang nama sebenarnya Agus Puryanto serta ditemukan tiga buah bom, beberapa alat untuk pembuatan bom senjata, amunisi, VCD, dan sepeda motor, ditempat persembunyian ini tidak ditemukan Noordin M. Top.

Tempat persembunyian Noordin M. Top di Dusun Binangun, Waringin Anom Kec. Kretek, Wonosobo Jawa Tengah dengan mengontrak rumah, penggerebekan dan penangkapan kelompok Noordin M. Top pada tanggal 29 April 2006 dimana dua orang meninggal dunia yaitu Abdul Hadi alias Baharuddin Saleh dan Jabin alias Gempur Budi Angkoro.

Sedangkan orang yang ditangkap bernama Sholahuddin pelaku bom Atrium dan bom malam natal di Duren Sawit Jakarta serta berperan sebagai kurir Noordsin M. Top, seorang lagi bernama Mustarifin menyerahkan diri di Temanggung Jawa Tengah.

Beberapa barang yang didapat disita berupa senjata api, revolver buatan China, bahan peledak, detonator, rompi anti peluru dan computer, posisi Jawa Tengah sebagai daerah perencanaan, persembunyian dan perekrutan teroris semakin menguatkan perkiraan.

Polri terkecoh oleh keberadaan Noordin M. Top di sasaran target penggerebekan, di mana sebelumnya Polri berkeyakinan Noordin M. Top berada di dalam rumah kontrakan tersebut, ternyata Noordin M. Top sudah melarikan diri yang diperkirakan menuju ke wilayah Banyumas Jawa Tengah dengan dikawal dua anggota Norrdin M. Top.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan perintah kepada Polri untuk mencari dan mempersempit ruang gerak kelompok teroris Noordin M. Top, dengan harapan agar pemburuan teroris dilakukan secara professional dan tidak meresahkan masyarakat.***